

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Inkarianto Cristi Saban

NIM: 312010019



UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

Agustus 2017



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inkarianto Cristi Saban
NIM : 312010019 Email : rian.saban@gmail.com
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pembimbing : 1. YAKUB ADI KRISANTO, SH., MH

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 6 September 2017



Tanda tangan & nama terang mahasiswa
INKARIANTO CRISTI SABAN



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inkarianto Cristi Saban

NIM : 312010019

Email : rian.saban@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul tugas akhir : Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terkait Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 6 September 2017

1956



Inkarianto Cristi Saban

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Yakub Adi Kristanto, SH., MH

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Inkarianto Cristi Saban

NIM: 312010019

Pembimbing



Yakub Adi Kristanto, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

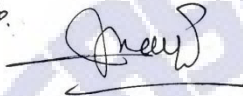
Agustus 2017

Lembaran Pengujian

Komisi Penguji

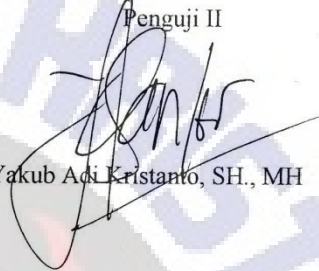
Penguji I

u.k.



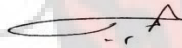
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si

Penguji II



Yakub Adi Kristanto, SH., MH

Penguji III

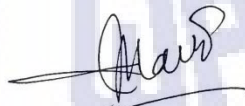


Arie Siswanto, SH., M.Hum

Diuji pada tanggal 31 Agustus 2017

Mengesahkan,

Setua Program Studi Ilmu Hukum



Christina Maya Indah, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah diucapkan, terkecuali mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak pernah berhenti-hentinya melimpahkan karunia kesehatan kepada penulis, limpahan kesehatan yang tercurah kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan SKRIPSI dengan Judul: "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terkait Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Penulis menyadari bahwa SKRIPSI ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap SKRIPSI ini dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat konstruktif, sebab semua karya Tuhan manusia pasti tidak ada yang sempurna. Terkecuali Tuhan Yang Maha Esa.

Salatiga, 31 Agustus 2017


Inkarnanto Cristi Saban

Abstrak

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi amat strategis karena menghadirkan sesuatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegak hukum.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, di Indonesia pengaturan akan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan sarana teknologi diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari pengaturan tersebut yaitu memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Sejak diberlakukan, telah banyak kasus hukum yang menggunakan UU ini. Namun, dalam perkembangannya UU ITE mengundang banyak perdebatan. Perdebatan-perdebatan tersebut muncul sebagai akibat dari berbagai kasus yang muncul terkait dengan salah satu pasal dalam UU ITE, yakni Pasal 27 ayat (3).

Sejak UU No.11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, tercatat setidaknya ada 20 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berkaitan dengan kasus penghinaan yang melibatkan pengguna internet yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dari 20 putusan pengadilan itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono, mengatakan paling tidak ada delapan putusan pengadilan yang memuat pertimbangan Hakim yang cukup baik berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dari catatan ICJR, paling tidak ada tiga pertimbangan penting yang dibuat oleh Majelis Hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat Mahkamah Agung (MA) yang dinilai telah sesuai dengan kaidah hukum acara pidana dan telah memposisikan perlindungan bagi kebebasan berekspresi pada posisinya. Pertimbangan yang pertama, yakni terkait dengan penegasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai delik aduan absolute, validasi bukti elektronik (*digital evidence*) dan mengenai alasan pembenar.

Pertimbangan yang kedua, yakni mengenai validasi bukti elektronik (*digital evidence*), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa bukti alat elektronik selain sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, keduanya dianggap sebagai alat bukti baru di samping alat bukti yang telah ada dalam KUHAP. Selain itu, pasal 6 UU ITE mengatur bahwa bukti elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya.

Pertimbangan penting yang ketiga, yakni mengenai alasan pembenar. Hal ini berkaitan dengan rumusan “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Dalam catatan ICJR, salah satu putusan PN Tangerang pada nomor perkara No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG menjadi salah satu bukti bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “tanpa hak” sebagai alasan pembenar apabila orang bisa dipidana atau tidak bisa dipidana.

DAFTAR ISI

Lembaran Persetujuan.....	i
Lembaran Pengujian.....	ii
Lembaran Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Kata Pengantar.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
II. RUMUSAN MASALAH.....	13
III. TUJUAN.....	13
IV. MANFAAT PENELITIAN.....	13
V. METODE PENELITIAN.....	14
VI. SISTEM MATIKA PENULISAN.....	17
BAB II HASIL PENELITIAN DAN ANALIS.....	18
I. PERKEMBANGAN ITE.....	18
II. UNDANG-UNDANG ITE.....	25
III. UNSUR-UNSUR.....	31
IV. HASIL PENELITIAN.....	37
A. GAMBARAN UMUM (KARAKTERISTIK) PIDANA.....	37
B. ANALISIS.....	44
C. PERBANDINGAN PUTUSAN.....	77
DOLUS EVENTUALIS.....	77
VALIDASI BUKTI ELEKTRONIK.....	85
SIFAT INFORMASI ELEKTRONIK.....	89
BAB III PENUTUP.....	93
I. KESIMPULAN.....	93
II. SARAN.....	94
DAFTAR BACAAN.....	95